

Hambatan Dalam Pelaksanaan Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Mandiri Di Lembaga Layanan PendidikanTinggi (LLDIKTI) Wilayah III

Alisa Nurhaziza, Drs. Wahyu Nurhadjmo, M.Si.

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sebelas Maret

email: alisanurhaziza_26@student.uns.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hambatan implementasi Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Mandiri di LLDIKTI Wilayah III. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka yang melibatkan informan dari LLDIKTI, khususnya Tim Kerja Pembelajaran, Kemahasiswaan dan Prestasi (Belmawa), dosen pengampu, dan mahasiswa. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, serta diuji keabsahannya menggunakan triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan implementasi MBKM Mandiri dapat dikelompokkan ke dalam tiga sisi yang saling berkaitan. Pertama pada sisi karakteristik masalah, hambatan ditunjukkan oleh kesulitan konversi SKS oleh perguruan tinggi, luasnya cakupan sasaran kebijakan, serta keberagaman kapasitas perguruan tinggi dalam mengimplementasikan program MBKM Mandiri. Kedua pada sisi karakteristik kebijakan, hambatan terlihat belum jelasnya pedoman teknis, keterbatasan pada sumber daya manusia (SDM), serta koordinasi antar stakeholder yang belum optimal sehingga menimbulkan perbedaan dalam pelaksanaan program. Sementara itu, pada sisi faktor lingkungan, hambatan ditunjukkan oleh rendahnya partisipasi mahasiswa yang dipengaruhi oleh terbatasnya sosialisasi kebijakan MBKM Mandiri serta belum meratanya dukungan dan keterlibatan mitra dalam pelaksanaan program, sehingga berbagai hambatan tersebut menunjukkan bahwa kebijakan tersebut masih belum berjalan secara optimal.

Kata Kunci: implementasi kebijakan, pendidikan tinggi, hambatan

Abstract

This study aims to analyze the barriers in the implementation of the Independent Learning–Independent Campus (MBKM) Mandiri policy at the Higher Education Service Institution (LLDIKTI) Region III. This study employs a qualitative method with a descriptive approach. Data collection was conducted through interviews, documentation, and literature review involving informants from LLDIKTI, particularly the Learning, Student Affairs, and Achievement Working Team (Belmawa), as well as lecturers and students. Data analysis was carried out through data reduction, data display, and conclusion drawing, and the validity of the data was ensured through source triangulation. The research findings indicate that the obstacles in implementing the Independent MBKM policy can be grouped into three interrelated aspects. From the perspective of problem characteristics, the obstacles are reflected in the difficulties faced by higher education institutions in converting academic credits (SKS), the broad scope of policy targets, and the

diversity in institutional capacities in implementing the MBKM program. From the policy characteristics perspective, the obstacles include the lack of clear technical guidelines, limitations in human resources (HR), and suboptimal coordination among stakeholders, which leads to variations in program implementation across institutions. Meanwhile, from the environmental perspective, the obstacles are indicated by low student participation, influenced by limited dissemination of the MBKM policy, as well as uneven support and involvement of partners in program implementation, suggesting that the policy implementation has not yet been carried out optimally.

Keywords: implementation, higher education, barriers

Pendahuluan

Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) merupakan salah satu bentuk transformasi pendidikan tinggi di Indonesia yang bertujuan untuk menciptakan sistem pembelajaran yang lebih fleksibel, adaptif, dan relevan dengan kebutuhan dunia kerja. Melalui kebijakan ini, mahasiswa diberikan kesempatan untuk memperoleh pengalaman belajar di luar program studi melalui berbagai kegiatan seperti magang, proyek independen, pertukaran pelajar, penelitian, maupun kewirausahaan. Kebijakan ini diharapkan mampu meningkatkan kompetensi mahasiswa, baik secara akademik maupun non-akademik, sehingga lebih siap menghadapi dinamika dunia kerja.

Dalam implementasinya, MBKM memberikan ruang bagi perguruan tinggi untuk mengembangkan program secara mandiri melalui skema MBKM Mandiri. Fleksibilitas ini memungkinkan perguruan tinggi menyesuaikan program dengan kebutuhan dan karakteristik masing-masing institusi. Namun demikian, fleksibilitas tersebut juga menuntut kesiapan yang tinggi, baik dari segi kelembagaan, sumber daya manusia, maupun sistem pendukung lainnya. Perbedaan kapasitas dan kesiapan perguruan tinggi berpotensi menimbulkan variasi dalam implementasi kebijakan di lapangan.

Secara umum, implementasi kebijakan publik tidak terlepas dari berbagai hambatan yang dapat mempengaruhi efektivitas pencapaian tujuan kebijakan. Hambatan tersebut dapat berasal dari kompleksitas permasalahan yang dihadapi, kejelasan kebijakan yang diimplementasikan, serta kondisi lingkungan pelaksanaan. Dalam konteks MBKM Mandiri, tantangan tersebut menjadi semakin kompleks karena kebijakan ini melibatkan banyak aktor dengan karakteristik yang beragam, baik dari sisi institusi pendidikan maupun pihak eksternal yang terlibat.

Dalam konteks pelaksanaan di lapangan, peran lembaga perantara menjadi penting dalam menjembatani implementasi kebijakan antara pemerintah dan perguruan tinggi. Lembaga ini tidak hanya berfungsi sebagai penyampai kebijakan, tetapi juga sebagai fasilitator dalam proses pembinaan, pendampingan, dan koordinasi. Salah satu lembaga yang memiliki peran tersebut adalah Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI), khususnya LLDIKTI Wilayah III yang membina perguruan tinggi dengan karakteristik yang beragam.

Meskipun sebagian besar perguruan tinggi telah mengadopsi kebijakan MBKM, pelaksanaannya belum sepenuhnya berjalan optimal. Data menunjukkan bahwa sekitar 70,51% perguruan tinggi telah melaksanakan program MBKM, namun tingkat partisipasi mahasiswa baru mencapai 10,99%. Selain itu, tidak semua perguruan tinggi memiliki kesiapan yang sama dalam mengimplementasikan program, baik dari segi sumber daya manusia, sistem akademik, maupun jaringan kerja sama dengan mitra. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa implementasi kebijakan belum dilaksanakan secara optimal.

Implementasi kebijakan MBKM Mandiri di LLDIKTI Wilayah III melibatkan berbagai perguruan tinggi dengan karakteristik yang beragam, sehingga efektivitas pelaksanaannya menjadi faktor kunci keberhasilan program. Keberhasilan ini menuntut kejelasan pedoman teknis dan kesiapan sumber daya manusia yang memadai untuk mengelola kegiatan yang kompleks. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi tersebut belum berjalan optimal yang ditandai oleh kesulitan teknis dalam konversi SKS serta koordinasi antar stakeholder yang belum terpadu. Kondisi ini menyebabkan variasi kualitas pelaksanaan di lapangan, sehingga diperlukan sinkronisasi aturan dan peningkatan sosialisasi guna mendorong partisipasi mahasiswa serta keterlibatan mitra eksternal secara lebih merata.

Penelitian ini berfokus untuk menganalisis bagaimana hambatan dalam implementasi kebijakan MBKM Mandiri di LLDIKTI Wilayah III dan diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kondisi implementasi kebijakan MBKM Mandiri serta menjadi dasar dalam upaya perbaikan pelaksanaan kebijakan di masa yang akan datang.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yang dilaksanakan di LLDIKTI Wilayah III. Penelitian ini dilakukan dalam rentang waktu tahun 2025 hingga 2026. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hambatan implementasi Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Mandiri di LLDIKTI Wilayah III. Data yang digunakan ada dua yaitu Pertama, data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan para informan. Kedua, menggunakan data sekunder yang diperoleh dari dokumen resmi, laporan pelaksanaan program MBKM, serta literatur dan regulasi yang relevan dengan kebijakan MBKM Mandiri.

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* dengan pemilihan informan yang ditentukan berdasarkan keterlibatan dan pemahaman terhadap implementasi kebijakan MBKM Mandiri. Informan dalam penelitian ini meliputi pihak LLDIKTI, khususnya Tim Kerja Pembelajaran, Kemahasiswaan dan Prestasi (Belmawa), dosen pengampu, serta mahasiswa yang terlibat dalam program MBKM Mandiri. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur untuk memperoleh informasi yang mendalam terkait hambatan implementasi kebijakan,

sedangkan dokumentasi digunakan untuk melengkapi dan memperkuat data hasil wawancara.

Uji validitas data dilakukan melalui teknik triangulasi sumber dengan membandingkan data yang diperoleh dari berbagai informan dan sumber yang berbeda, sehingga dapat meningkatkan kredibilitas hasil penelitian. Analisis data dilakukan menggunakan model Miles dan Huberman melalui tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan secara sistematis dan logis.

Hasil dan Pembahasan

A. Hambatan Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Mandiri di Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah III

Dalam pelaksanaan Implementasi Kebijakan MBKM Mandiri masih terlihat masih adanya berbagai hambatan yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan tersebut. Hambatan yang terjadi saling berkaitan satu sama lain sehingga perlu dilakukan analisis terhadap hambatan yang terjadi. Berdasarkan hasil penelitian, hambatan implementasi kebijakan MBKM Mandiri dilihat dari sisi karakteristik masalah, karakteristik kebijakan, serta faktor lingkungan.

1. Karakteristik Masalah

Hambatan pada karakteristik masalah dalam implementasi kebijakan MBKM Mandiri dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu tingkat kesulitan teknis, kemajemukan kelompok sasaran, proporsi kelompok sasaran, serta luasnya perubahan perilaku yang dituntut. Keempat aspek tersebut menunjukkan tingkat kompleksitas masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan.

Pertama, pada aspek tingkat kesulitan teknis, hambatan terlihat pada proses konversi Satuan Kredit Semester (SKS) yang masih menjadi kendala di perguruan tinggi. Belum adanya standar yang seragam dalam menyetarakan kegiatan MBKM ke dalam kurikulum menyebabkan perbedaan dalam pengakuan hasil kegiatan mahasiswa. Kondisi ini menunjukkan bahwa secara teknis, implementasi kebijakan masih menghadapi kesulitan dalam penyelarasan sistem akademik, sehingga berimplikasi pada belum optimalnya pelaksanaan MBKM Mandiri di tingkat perguruan tinggi.

Kedua, pada aspek kemajemukan kelompok sasaran, kebijakan MBKM Mandiri melibatkan berbagai perguruan tinggi dengan karakteristik yang beragam. Perbedaan tersebut mencakup kondisi institusi, ketersediaan sumber daya, serta tingkat kesiapan dalam melaksanakan program. Hal ini menyebabkan implementasi kebijakan tidak dapat dilakukan secara seragam di seluruh perguruan tinggi, sehingga menimbulkan variasi dalam pelaksanaan dan capaian program. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kemajemukan

kelompok sasaran menjadi tantangan dalam memastikan implementasi kebijakan berjalan secara konsisten dan merata.

Ketiga, pada aspek tingkat proporsi kelompok sasaran, kebijakan MBKM Mandiri memiliki cakupan sasaran yang cukup luas, yaitu sebanyak 244 perguruan tinggi. Namun, pada realitas di lapangan, besarnya jumlah sasaran tersebut tidak diimbangi dengan jumlah fasilitator yang memadai, yang hanya berkisar sekitar 7 orang. Kondisi ini menyebabkan proses pendampingan belum dapat dilakukan secara optimal dan merata di seluruh perguruan tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa ketidakseimbangan antara jumlah sasaran dan kapasitas fasilitator menjadi hambatan dalam implementasi kebijakan, khususnya dalam memastikan efektivitas pendampingan program MBKM Mandiri.

Keempat, pada aspek luasnya perubahan perilaku yang dituntut, kebijakan MBKM Mandiri menuntut adanya perubahan dalam sistem pembelajaran, baik dari sisi perguruan tinggi, dosen, maupun mahasiswa. Perubahan tersebut mencakup pola pembelajaran di luar kampus, fleksibilitas kurikulum, serta keterlibatan dalam berbagai kegiatan di luar program studi. Namun, tidak semua pihak dapat dengan mudah beradaptasi terhadap perubahan tersebut, sehingga menjadi salah satu hambatan dalam implementasi kebijakan. Kondisi ini menunjukkan bahwa tuntutan perubahan perilaku yang luas memerlukan kesiapan dan adaptasi yang tidak merata di antara para pelaksana kebijakan. Sehingga, jika diamati dari keempat aspek tersebut, dapat diketahui bahwa pada sisi karakteristik masalah, implementasi kebijakan MBKM Mandiri masih menghadapi berbagai hambatan yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan di lapangan.

2. Karakteristik Kebijakan

Hambatan pada karakteristik kebijakan dalam implementasi MBKM Mandiri dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu kejelasan dan konsistensi tujuan kebijakan, kejelasan dan konsistensi aturan pada badan pelaksana, ketepatan alokasi sumber daya, keterpaduan koordinasi antar lembaga, komitmen dan dukungan pelaksana kebijakan, tingkat komitmen aparat terhadap tujuan kebijakan, serta akses kelompok luar untuk berpartisipasi. Aspek-aspek tersebut mencerminkan bagaimana desain kebijakan diterjemahkan ke dalam praktik implementasi di lapangan.

Pertama, pada aspek kejelasan dan konsistensi tujuan kebijakan, secara umum tujuan MBKM Mandiri telah dirumuskan dengan jelas dalam dokumen kebijakan. Namun, dalam implementasinya masih terdapat perbedaan pemahaman di tingkat perguruan tinggi. Hal ini terlihat dari adanya variasi dalam pelaksanaan program, baik dari sisi bentuk kegiatan maupun mekanisme pengakuan hasil. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa proses diseminasi dan

internalisasi tujuan kebijakan belum berjalan secara optimal, sehingga menimbulkan interpretasi yang berbeda di antara pelaksana kebijakan.

Kedua, untuk aspek ketepatan alokasi sumber daya, secara umum pelaksanaan MBKM Mandiri masih menghadapi keterbatasan baik dari sisi sumber daya manusia, anggaran, maupun sarana pendukung. Dalam implementasinya, keterbatasan tersebut berdampak pada belum optimalnya pendampingan, monitoring dan evaluasi, serta sosialisasi kebijakan kepada perguruan tinggi. Selain itu, terdapat ketidakseimbangan antara beban kebijakan yang harus dijalankan dengan kapasitas sumber daya yang tersedia, baik di tingkat LLDIKTI maupun perguruan tinggi, sehingga menimbulkan ketimpangan dalam pelaksanaan program. Hal ini menunjukkan bahwa ketepatan alokasi sumber daya belum sepenuhnya terpenuhi, yang berimplikasi pada belum meratanya implementasi MBKM Mandiri di berbagai perguruan tinggi.

Ketiga, pada aspek keterpaduan koordinasi antar lembaga, hambatan terlihat dari belum optimalnya koordinasi antara LLDIKTI, perguruan tinggi, dan mitra eksternal. Koordinasi yang belum berjalan secara efektif menyebabkan adanya kendala dalam penyampaian informasi, perbedaan pemahaman antar pihak, serta kurangnya sinkronisasi dalam pelaksanaan program. Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme koordinasi yang belum terintegrasi secara baik dapat menghambat keterpaduan implementasi kebijakan di lapangan.

Keempat, pada aspek komitmen dan dukungan pelaksana kebijakan, hambatan terlihat dari belum meratanya keterlibatan dan kesiapan pelaksana di masing-masing perguruan tinggi. Tidak semua dosen dan tenaga kependidikan memiliki pemahaman, kesiapan, serta dukungan yang sama terhadap pelaksanaan MBKM Mandiri. Kondisi ini berdampak pada kurang optimalnya pengelolaan program, terutama dalam pembimbingan mahasiswa dan integrasi kegiatan MBKM ke dalam kurikulum. Hal ini menunjukkan bahwa dukungan pelaksana menjadi faktor penting yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan.

Kelima, pada aspek kejelasan dan konsistensi aturan pada badan pelaksana, hambatan terlihat dari belum terstandarisasinya pedoman teknis yang menjadi acuan dalam pelaksanaan MBKM Mandiri. Ketidakjelasan ini menyebabkan perguruan tinggi harus mengembangkan mekanisme pelaksanaan secara mandiri, yang berpotensi menimbulkan perbedaan prosedur dan standar pelaksanaan. Kondisi ini menunjukkan bahwa lemahnya kejelasan aturan teknis dapat mengurangi konsistensi dan keseragaman implementasi kebijakan.

Keenam, pada aspek tingkat komitmen aparat terhadap tujuan kebijakan, hambatan terlihat dari belum meratanya tingkat kesungguhan pelaksana dalam memahami dan menginternalisasi tujuan kebijakan MBKM Mandiri. Dalam beberapa kasus, pelaksanaan program masih berorientasi pada pemenuhan administrasi dibandingkan dengan pencapaian substansi kebijakan. Hal ini menunjukkan bahwa komitmen aparat pelaksana belum sepenuhnya selaras dengan tujuan kebijakan, sehingga mempengaruhi kualitas implementasi di lapangan.

Ketujuh, pada aspek akses kelompok luar untuk berpartisipasi, hambatan ditunjukkan oleh belum meratanya keterlibatan mitra eksternal dalam mendukung program MBKM Mandiri. Keterbatasan jaringan kerja sama serta belum optimalnya kolaborasi dengan pihak luar menyebabkan kesempatan mahasiswa untuk mengikuti program menjadi tidak merata. Kondisi ini menunjukkan bahwa keterlibatan aktor eksternal masih perlu diperkuat untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan secara lebih luas. Dengan demikian, berdasarkan keseluruhan aspek tersebut, dapat diketahui bahwa pada sisi karakteristik kebijakan, implementasi MBKM Mandiri masih menghadapi berbagai hambatan yang tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga struktural dan kelembagaan. Hambatan tersebut berimplikasi pada belum optimalnya efektivitas, konsistensi, dan pemerataan pelaksanaan kebijakan di berbagai perguruan tinggi.

3. **Faktor Lingkungan**

Hambatan pada faktor lingkungan dalam implementasi MBKM Mandiri dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu kondisi sosial ekonomi dan tingkat kemajuan teknologi, dukungan publik terhadap kebijakan, sikap pelaksana terhadap kebijakan, serta tingkat komitmen dan keterampilan aparat dan implementor. Aspek-aspek tersebut mencerminkan kondisi eksternal yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan di lapangan.

Pertama, pada aspek kondisi sosial ekonomi dan tingkat kemajuan teknologi, hambatan terlihat dari belum meratanya akses informasi mengenai program MBKM Mandiri di kalangan mahasiswa. Perbedaan kondisi antar perguruan tinggi, baik dari sisi fasilitas teknologi maupun kapasitas institusi, menyebabkan tidak semua mahasiswa memperoleh informasi dan pemahaman yang sama terkait program. Kondisi ini menunjukkan bahwa faktor lingkungan eksternal, khususnya kesenjangan akses dan pemanfaatan teknologi, masih menjadi kendala dalam pemerataan implementasi kebijakan.

Kedua, pada aspek dukungan publik terhadap kebijakan, hambatan ditunjukkan oleh masih rendahnya partisipasi mahasiswa dalam mengikuti program MBKM Mandiri. Hal ini mengindikasikan bahwa kebijakan belum sepenuhnya mendapatkan dukungan dari kelompok sasaran. Rendahnya

partisipasi tersebut dipengaruhi oleh kurangnya pemahaman mahasiswa terhadap manfaat program, serta belum optimalnya sosialisasi kebijakan yang dilakukan oleh pihak terkait. Kondisi ini menunjukkan bahwa dukungan publik menjadi faktor penting yang menentukan tingkat keberhasilan implementasi kebijakan.

Ketiga, pada aspek sikap pelaksana terhadap kebijakan, secara umum pelaksana menunjukkan sikap yang cenderung mendukung terhadap program MBKM Mandiri. Namun demikian, dalam implementasinya masih terdapat perbedaan dalam tingkat kesiapan, pemahaman, dan kesungguhan antar pelaksana di masing-masing perguruan tinggi. Perbedaan tersebut berdampak pada variasi dalam pelaksanaan program, sehingga mempengaruhi konsistensi dan keberlangsungan implementasi kebijakan di lapangan.

Keempat, pada aspek tingkat komitmen dan keterampilan aparat serta implementor, hambatan terlihat dari belum meratanya kemampuan dalam mengelola program MBKM Mandiri, terutama dalam hal koordinasi, pendampingan, serta pengelolaan kegiatan yang melibatkan pihak eksternal. Selain itu, keterlibatan mitra eksternal sebagai bagian dari lingkungan implementasi juga belum merata di setiap perguruan tinggi. Keterbatasan jaringan kerja sama dan kapasitas pengelolaan program menyebabkan kesempatan mahasiswa untuk mengikuti MBKM Mandiri menjadi tidak merata. Hal ini menunjukkan bahwa faktor kompetensi dan kesiapan aparat pelaksana masih menjadi tantangan dalam mendukung implementasi kebijakan secara optimal. Dengan demikian, berdasarkan keseluruhan aspek tersebut, dapat diketahui bahwa faktor lingkungan dalam implementasi kebijakan MBKM Mandiri masih menghadapi berbagai hambatan yang bersifat eksternal, baik terkait kondisi sosial ekonomi, dukungan publik, maupun kapasitas pelaksana. Hambatan tersebut berimplikasi pada belum optimalnya efektivitas serta pemerataan pelaksanaan kebijakan di lapangan.

Penutup

Dalam pelaksanaan implementasi kebijakan MBKM Mandiri masih mengalami hambatan yang mempengaruhi proses implementasi di lapangan. Hambatan tersebut muncul dari sisi karakteristik masalah, karakteristik kebijakan, maupun faktor lingkungan yang saling berkaitan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan belum sepenuhnya mampu mencapai tujuan yang diharapkan.

Pada karakteristik masalah, hambatan terlihat dari kesulitan dalam konversi Satuan Kredit Semester (SKS), luasnya cakupan sasaran kebijakan, serta keberagaman kapasitas perguruan tinggi. Perbedaan kapasitas tersebut menyebabkan implementasi program tidak berjalan secara seragam. Selain itu, jumlah sasaran yang besar juga menjadi

tantangan dalam proses pendampingan. Kondisi ini menunjukkan bahwa kompleksitas masalah turut mempengaruhi pelaksanaan kebijakan di lapangan.

Pada karakteristik kebijakan, hambatan ditunjukkan oleh belum jelasnya pedoman teknis, keterbatasan sumber daya manusia, serta belum optimalnya koordinasi antar lembaga. Ketidakjelasan pedoman menyebabkan perbedaan dalam pelaksanaan program di masing-masing perguruan tinggi. Keterbatasan sumber daya juga berdampak pada kurang optimalnya pendampingan dan monitoring. Hal ini menunjukkan bahwa desain kebijakan belum sepenuhnya didukung oleh kesiapan pelaksanaannya.

Sementara itu, pada faktor lingkungan, hambatan terlihat dari rendahnya partisipasi mahasiswa, terbatasnya sosialisasi kebijakan, serta belum meratanya dukungan dan keterlibatan mitra eksternal. Kondisi ini menyebabkan tidak semua mahasiswa memperoleh informasi yang cukup mengenai program MBKM Mandiri. Selain itu, keterbatasan kerja sama dengan mitra juga mempengaruhi kesempatan mahasiswa dalam mengikuti program. Hal ini menunjukkan bahwa faktor eksternal turut mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan.

Meskipun demikian, kebijakan MBKM Mandiri tetap memberikan peluang bagi perguruan tinggi dan mahasiswa untuk mengembangkan pembelajaran yang lebih fleksibel. Program ini mendorong mahasiswa untuk memperoleh pengalaman belajar di luar kampus. Selain itu, kebijakan ini juga membuka ruang kerja sama dengan berbagai pihak. Namun, peluang tersebut belum sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal di seluruh perguruan tinggi.

Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kejelasan pedoman teknis sebagai acuan pelaksanaan program. Pedoman yang jelas akan membantu meminimalisir perbedaan implementasi di lapangan. Selain itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia juga menjadi hal yang penting. Upaya ini diharapkan dapat mendukung pelaksanaan program yang lebih efektif.

Selanjutnya, diperlukan penguatan koordinasi antar lembaga, baik antara LLDIKTI, perguruan tinggi, maupun mitra eksternal. Koordinasi yang baik akan mendukung pelaksanaan program yang lebih terarah. Sosialisasi kebijakan juga perlu ditingkatkan agar informasi dapat tersampaikan secara merata kepada mahasiswa. Selain itu, perluasan kerja sama dengan mitra eksternal perlu dilakukan untuk mendukung pelaksanaan program.

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar cakupan penelitian diperluas ke wilayah LLDIKTI lainnya. Hal ini bertujuan untuk memperoleh perbandingan implementasi kebijakan di berbagai daerah. Selain itu, penelitian selanjutnya dapat mengkaji dampak MBKM Mandiri terhadap mahasiswa. Penelitian ini juga memiliki keterbatasan dalam pengumpulan data, sehingga penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan sumber data yang lebih beragam

Referensi

- Abdi. 2020. *Metode Penelitian Kualitatif (Teori & Panduan Praktis Analisis Data Kualitatif)*.
- Altbach, P.G. and Knight, J. 2007. 'The Internationalization of Higher Education: Motivations and Realities', *Journal of Studies in International Education*, 11(3–4), pp. 290–305. <https://doi.org/10.1177/1028315307307630>
- Arafat. 2023. *Kebijakan Publik: Teori dan Praktik*.
- Ariefah, et al. 2023. 'Sentiment Analysis for Curriculum of Independent Learning Based on Naïve Bayes with Laplace Estimator', *International Conference on Information Technology Research and Innovation*, pp. 157–161.
- Belmawa LLDIKTI Wilayah III. 2025. *Laporan SPI Tim Kerja Belmawa*.
- Dewi, D.S.K. 2022. *Buku Ajar Kebijakan Publik: Proses, Implementasi dan Evaluasi*. Surabaya: Samudra Biru.
- Dimmera, B.G., Purnasari, P.D. and S. 2022. 'Persepsi, Kebutuhan, dan Tantangan dalam Implementasi Kebijakan MBKM di Perguruan Tinggi PTS di Wilayah Perbatasan', *Jurnal Sebatik*, 26(2), pp. 77–87.
- Effendy, A.D. and Hertati. 2024. 'Implementasi Kebijakan MBKM melalui Program MSIB', *Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 7(2), pp. 185–197.
- Gusdini, N. 2022. 'Merdeka Belajar Kampus Merdeka sebagai Upaya Meningkatkan Kualitas Lulusan', *Jurnal Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan*, 22(2), pp. 141–148.
- Harlanu, et al. 2024. 'The Impact of MBKM and Motivation on Students' Learning Outcomes', *Journal of Curriculum and Teaching*, 13(2), pp. 299–304.
- Kamal Alamsyah. 2016. *Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi*. Jakarta: Media Citra Mandiri Press.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. 2021. *Panduan Implementasi MBKM*. Jakarta.
- Kusumawardani, S.S., et al. 2024. *Buku Panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka*. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
- Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III. 2024. *Laporan Kinerja LLDIKTI Wilayah III Tahun 2024*.
- Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III. 2024. *Surat Keputusan Kepala LLDIKTI Wilayah III tentang MBKM Mandiri*.
- Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III. 2024. *Laporan Perguruan Tinggi LLDIKTI Wilayah III*. Available at: <https://dashboard-lldikti3.kemdikbud.go.id/>
- Mazmanian, D.A. and Sabatier, P.A. 1983. *Implementation and Public Policy*. Glenview: Scott Foresman.
- Miles, M.B., Huberman, A.M. and Saldaña, J. 2014. *Qualitative Data Analysis*. 3rd ed. Thousand Oaks: Sage.
- Moleong, L.J. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, R. 2018. *Public Policy: Teori Kebijakan Publik*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi.

- Perkins, R. and Neumayer, E. 2014. 'Geographies of Educational Mobilities', *Theorizing Student Mobility*, 1(1), pp. 1–20. <https://doi.org/10.1177/1474474013500460>
- Rahman, A. 2022. 'Analisis Hambatan Implementasi MBKM di PTS', *Jurnal Ilmiah Pendidikan*, 8(1), pp. 45–60. <https://doi.org/10.5678/jpip.v8i1.1234>
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024. 2020. Jakarta: Bappenas.
- Sari, R.A. and Prabowo, H. 2021. 'Implementasi MBKM di Perguruan Tinggi: Tantangan dan Solusi', *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 6(2), pp. 123–135. <https://doi.org/10.1234/jpb.v6i2.5678>
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Tim Kerja Pembelajaran, Kemahasiswaan dan Prestasi. 2024. *Laporan Evaluasi Internal MBKM Mandiri*.
- Wijayanto, B. and Wulandari. 2023. 'Systematic Review Implementasi MBKM', *Jurnal PIPSI*, 8(1), pp. 33–42.
- Yulisma, L., Arifin, N.R., Setiadi, T. and Khoeriyah, N.D. 2023. 'Problematisa Implementasi MBKM-PMMDN', *Jurnal Wahana Pendidikan*, 10(1), pp. 19–28.